

---

---

## Kebijakan Repatriasi Myanmar Terhadap Etnis Rohingya di Bangladesh Pada Tahun 2017-2019

Hikari Akimi Tioho<sup>1)</sup>, Penny Kurnia Putri<sup>2)</sup>, A.A Ayu Intan Prameswari<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3)</sup> Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana.

---

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan alasan pemerintah Myanmar dalam mengeluarkan kebijakan repatriasi kepada etnis Rohingya di Bangladesh pada tahun 2017-2019, yang ditinjau dari determinan eksternal terhadap pembuatan kebijakan luar negeri melalui analisis kualitatif eksplanatif. Konflik etnis menjadi salah satu konflik terbesar Myanmar dalam dunia internasional. Perubahan sikap pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya, yang semula tidak mengakuinya sebagai bagian masyarakat Myanmar, namun kemudian mengeluarkan kebijakan repatriasi pada tahun 2017-2019, memicu perhatian dunia. Penulis mengidentifikasi bahwa determinan eksternal yang memengaruhi Myanmar adalah reaksi negara lain dan aliansi. Reaksi negara lain adalah berupa desakan negara berpengaruh di kawasan (ASEAN), seperti Indonesia dan Malaysia yang sekaligus menjadi negara mayoritas Muslim dan sangat mendukung penuh hak asasi manusia, serta perlindungan terhadap etnis Rohingya. Negara yang berbatasan langsung dengan Myanmar, seperti Bangladesh sebagai negara yang paling banyak menampung pengungsi dan menjadi negara yang mengalami dampak negatif dari kegiatan perpindahan pengungsi Rohingya dari Myanmar menjadi alasan pemerintah Myanmar mengeluarkan kebijakan repatriasi terhadap Rohingya. Selain reaksi dari negara lain, negara aliansi seperti Tiongkok menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi pembuatan yang memiliki pengaruh terhadap kondisi ekonomi, politik dan militer dari Myanmar, sekaligus menjadi negara aliansi terkuat dalam politik internasional mengharuskan Myanmar untuk mempertimbangkan kebijakan repatriasi sebagai solusi menuntaskan permasalahan Rohingya.

**Kata-kunci** : Bangladesh, Myanmar, Repatriasi, Rohingya

---

### Abstract

*This study aims to explain the reasons for the Myanmar government in issuing a repatriation policy to Rohingya in Bangladesh in 2017-2019, in terms of external determinants of foreign policy making through explanatory qualitative analysis. Ethnic conflict is one of Myanmar's biggest conflicts in the international world. The change of the attitude of the Myanmar government towards the Rohingya, who initially did not recognize them as part of Myanmar society, but then issued a repatriation policy in 2017-2019, sparked worldwide attention. The authors identify that the external determinants affecting Myanmar are the reactions of other countries and alliances. The reaction of other countries is in the form of pressure from influential regional countries (ASEAN) such as Indonesia and Malaysia which are Muslim-majority countries that fully support human rights as well as protection for the Rohingya ethnic group. Countries directly adjacent to Myanmar, such as Bangladesh, are the countries that host the most refugees have*

*experienced negative impacts from the activities. In addition to reactions from other countries, alliance countries such as China are one of the factors that can influence policy making in which China, as a country that has influence over the economic, political and military conditions of Myanmar, as well as being Myanmar's strongest alliance state in international politics requires Myanmar to consider repatriation policy as a solution for the Rohingya problem.*

**Keywords :** *Bangladesh, Myanmar, Repatriation, Rohingya*

---

**Kontak Penulis**

Hikari Akimi Tioho,

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana

Denpasar, 80234

E-mail : hikari.tioho@gmail.com

## PENDAHULUAN

Isu pengungsi merupakan salah satu isu utama dalam dunia internasional. Hal tersebut dibuktikan dengan jumlah pengungsi yang tiap tahunnya terus meningkat, pada akhir tahun 2018 terdapat 70,8 juta orang yang secara paksa dipindahkan atau keluar dari tempat asal mereka ke beberapa negara akibat adanya konflik yang menimbulkan penganiayaan, kekerasan, hingga pelanggaran hak asasi manusia. Dua pertiga kasus pengungsi yang terjadi diberbagai belahan dunia bermula dari negara Suriah, Sudan Selatan, Afganistan, Myanmar hingga Somalia.

Myanmar ialah negara di Asia Tenggara yang dikenal memiliki isu kekerasan terhadap suatu etnis dalam negara tersebut. Penganiayaan terhadap Rohingya di Myanmar telah berlangsung sejak tahun 1948 dan menjadi salah satu pelanggaran HAM yang sangat fatal dalam dunia internasional. Sebagai salah satu negara yang majemuk, Myanmar menjadi rumah bagi konflik etnis dan perselisihan politik yang sulit dipecahkan melalui setiap era pemerintahan sejak kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1948 (Burma Centrum Nederland Transnational Institute, 24/02/2014). Kolonialisasi yang dilakukan oleh Inggris pada tahun 1823 dan okupasi dari Burma menjadikan masyarakat Muslim Rohingya mengalami diskriminasi.

Dengan populasi yang mencapai kurang lebih 1,1 juta penduduk, Rohingya tidak mendapatkan pengakuan resmi oleh pemerintah Myanmar semenjak munculnya Undang-Undang Kewarganegaraan pada tahun 1982 yang dinilai menuai kontroversi (Majid, 02/10/2017). Akibat dari tidak adanya pengakuan dari pemerintah setempat, menjadikan Rohingya sebagai sasaran kekerasan, pelecehan hingga pembatasan hak kebebasan, serta akses terhadap pendidikan dan penyitaan sewenang-wenang terhadap properti yang dimiliki (HRW, 10/02/2021). Hal tersebut menjadi alasan Rohingya untuk keluar dari Myanmar dan mencari suaka ke beberapa negara tetangga, dan menjadikan Bangladesh sebagai salah satu negara tujuannya. Pada

tahun 2017, sebuah konflik terjadi antara pemerintah Myanmar dan sebuah kelompok militan yang dikenal dengan *Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA)* di Arakan, Myanmar.

Adanya faktor internal mulai dari pengaruh sejarah dan budaya yang dianggap berbeda dengan Myanmar, kapabilitas militer Myanmar dan sistem politik yang tidak mengakui, serta mengeluarkan Rohingya sebagai salah satu bagian dari Myanmar menjadikan salah satu faktor munculnya diskriminasi terhadap Rohingya di Myanmar. Dengan terjadinya konflik tersebut memunculkan beberapa tekanan internasional dari negara-negara kawasan hingga aliansi yang menganggap Myanmar sebagai negara yang bertanggung jawab atas konflik tersebut. Setelah konflik di Arakan terjadi, pemerintah Myanmar melahirkan sebuah kebijakan repatriasi terhadap etnis Rohingya yang disepakati oleh pemerintah Bangladesh dengan mengizinkan beberapa pengungsi Rohingya untuk kembali ke Myanmar dan memberikan hak kewarganegaraan (Aljazeera, 27/07/2019). Repatriasi ialah salah satu kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh Myanmar terhadap Rohingya yang berada di kamp pengungsi di wilayah Cox's Bazar, Banglaesh.

Munculnya kebijakan repatriasi oleh pemerintah Myanmar terhadap Rohingya menimbulkan pertanyaan besar terhadap semua khalayak. Hal tersebut dikarenakan oleh adanya perubahan sikap yang drastis oleh pemerintah Myanmar yang sangat bertolak belakang dengan sikap awal pemerintah Myanmar terhadap Rohingya, serta perlakuan yang buruk terhadap etnis tersebut. Pada kebijakan repatriasi menegaskan bahwa pengungsi Rohingya akan diterima kembali oleh pemerintah Myanmar dan dijanjikan sebuah kewarganegaraan Myanmar yang sah terhadap Rohingya. Sesuai dengan latar belakang yang telah penulis paparkan, penelitian ini akan menganalisis alasan pemerintah Myanmar mengeluarkan kebijakan repatriasi terhadap Etnis Rohingya di Bangladesh pada tahun 2017-2019.

Penelitian ini menggunakan dua literatur sebagai kajian pustaka, yang pertama literatur dari Po Shang tahun 2021 yang berjudul *“Myanmar’s Foreign Policy: Shifting Legitimacy, Shifting Strategic Culture.”* Jurnal Shang membantu penulis memahami pembuatan kebijakan luar negeri Myanmar serta faktor yang memengaruhi pembuatan kebijakan tersebut. Tulisan Shang berfokus pada faktor internal, yakni budaya strategis dalam menjalankan pemerintahan Myanmar dan menjadikannya sebagai negara Non-Blok. Literatur kedua yang penulis gunakan adalah milik Lauren Stanley tahun 2015 yang berjudul *“Repatriation as Controversial Concept: The Case of Somali Refugees in Kenya.”* Jurnal ini memaparkan mengenai konsep repatriasi yang digunakan oleh pemerintah Kenya dan UNHCR dalam menangani kasus pengungsi Somalia di Kenya. Repatriasi tidak selalu menjadi solusi yang tepat dalam mengatasi krisis pengungsi.

Selanjutnya untuk menganalisis isu, penulis menggunakan dua konsep, yaitu determinan kebijakan luar negeri dan repatriasi. Determinan kebijakan luar negeri merupakan sebuah faktor yang dapat memengaruhi pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara. Menurut Jain (2018: 165), faktor internal dan faktor dapat memengaruhi suatu kebijakan luar negeri. Faktor internal terdiri dari pengaruh sejarah, budaya, letak geografis, pengembangan ekonomi, sumber daya alam, kapabilitas militer, dan populasi. Sedangkan faktor eksternal meliputi opini publik dunia internasional, organisasi internasional, reaksi negara lain, aliansi, dan struktur kekuatan. Menurut Boy *et.al* (2019: 5) kedua faktor ini dianggap memiliki dampak yang signifikan terhadap perumusan kebijakan luar negeri oleh suatu actor. Dalam menganalisis alasan pemerintah Myanmar mengeluarkan kebijakan repatriasi terhadap Rohingya, penulis menggunakan faktor eksternal sebagai faktor penentu.

Faktor opini publik dunia dinilai dapat memengaruhi seorang pemimpin dalam pengambilan keputusan yang berhubungan

dengan kondisi negara. Para pemimpin politik menggunakan opini publik dalam mendukung posisi pemerintah atau dalam upaya untuk membentuk posisi kebijakan yang bersifat afirmatif (Walter, 2015: 202). Sedangkan faktor organisasi internasional (OI) memiliki peran dalam memberikan fasilitas berupa interaksi antarnegara pada tingkat global, sehingga dalam perumusannya sering kali kebijakan luar negeri suatu negara dapat dipengaruhi oleh organisasi internasional yang di dalamnya beranggotakan hanya beberapa negara saja (Bojang, 2018: 4).

Faktor selanjutnya adalah reaksi negara lain. Negara dalam merumuskan sebuah kebijakan luar negeri harus menghormati hak-hak setiap negara lain (Gimba dan Ibrahim, 2018: 127). Hal ini menjelaskan bahwa setiap negara dalam membuat kebijakan luar negeri memerlukan pertimbangan terhadap reaksi dari negara lain. Negara dituntut untuk memperhitungkan serta mengakomodasi kepentingan dari negara lainnya agar dapat menghasilkan kebijakan luar negeri yang dapat berjalan dengan baik. Di sisi lain, faktor aliansi merupakan sebuah hasil interaksi yang terjadi antara unit-unit politik berdaulat yang didorong oleh kepentingan dominan atau penyeimbang kekuasaan (Dar *et al*, 2017: 45). Aliansi dinilai sebagai salah satu komponen penting dalam pembuatan kebijakan luar negeri karena pihak-pihak negara aliansi harus menanggapi permintaan dan tuntutan negara sekutu serta menahan diri untuk tidak membuat kebijakan atau mengambil suatu keputusan yang dapat merugikan negara aliansi mereka (Bojang, 2018: 4).

Faktor terakhir adalah struktur kekuatan. Struktur kekuatan politik suatu negara mencakup kekuatan besar, menengah hingga kecil yang memiliki peran penting terhadap interaksi suatu negara-negara (Bojang, 2018: 3). Pada sistem multi-kutub tradisional, lebih mudah bagi negara bagian untuk beralih sisi dan mendapatkan keuntungan maksimal dari semua sisi. Setiap jenis struktur kekuasaan di tingkat internasional memiliki dinamikanya sendiri

dan berdampak pada kebijakan luar negeri negara (Gimba & Ibrahim, 2018: 126).

Repatriasi merupakan sebuah aktifitas pemulangan pengungsi ke negara asal (Kirui *et.al*, 2020: 122). Menurut Torido (2015: 95) terjadinya repatriasi dapat disebabkan karena adanya tekanan eksternal seperti permintaan dari negara tujuan atau dari negara asal pengungsi dengan pelaksanaan repatriasi yang sepenuhnya ada ditangan para pengungsi. Repatriasi yang dilakukan oleh sebuah negara harus bersifat sukarela atau tanpa adanya paksaan dari pihak-pihak tertentu. Hal ini didukung dalam Pasal 33 Konvensi Pengungsi tahun 1951 bahwa negara tidak diperbolehkan mengusir atau mengembalikan pengungsi secara paksa jika kebebasan mereka akan terancam. Menurut Chrisp dan Long (2016: 144), UNHCR dalam menjalankan kegiatan repatriasi, memerlukan aksi nyata agar kegiatan tersebut dapat terealisasi dengan baik.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Martono (2015), penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai kata atau kalimat yang berasal dari buku, individu, atau sumber lain. Penelitian ini juga bersifat eksplanatif dengan tujuan untuk memberikan sebuah penjelasan bagaimana suatu fenomena, peristiwa, kejadian atau gejala terjadi (Prasetyo *et.al*, 2011).

Penulis menggunakan teknik studi kepustakaan serta sumber data sekunder yang diperoleh dari jurnal, buku hingga media *online* dalam mengumpulkan data. Tingkat analisis yang digunakan ialah negara Myanmar, dan pada teknik analisis data menggunakan pendekatan *secondary analysis* yang mengacu pada penelitian yang didasari oleh data yang dikumpulkan oleh orang lain (Chivanka, 2018: 1). Analisis data dimulai dengan penetapan masalah yaitu, alasan pemerintah Myanmar mengeluarkan kebijakan repatriasi terhadap etnis Rohingya di Bangladesh pada tahun 2017 – 2019. Penulis menganalisis dengan memakai teknik reduksi data, dan hanya menggunakan

data yang berkaitan dengan topik bahasan dalam mengetahui penyebab pemerintah Myanmar mengeluarkan kebijakan repatriasi terhadap etnis Rohingya di Bangladesh. Setelah terkumpul, data – data disusun agar lebih terstruktur untuk kemudian dianalisis menggunakan konsep repatriasi dan determinan kebijakan luar negeri.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Etnis Rohingya di Myanmar

Myanmar menjadi salah satu negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara, berbatasan langsung dengan negara Bangladesh, India, Tiongkok, dan beberapa negara Asia Tenggara seperti Thailand dan Laos. Myanmar termasuk dalam salah satu negara yang memiliki keberagaman etnis. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh *Embassy of The Republic of Myanmar in Brazil* (2023), terdapat 135 kelompok etnis yang secara sah diakui oleh pemerintah Myanmar dan dimasukkan dalam delapan kategori etnis yang disebut sebagai ras etnis nasional utama Myanmar. Etnis-etnis tersebut terdiri dari etnis Bamar (68 %), Shan (10 %), Kayin (7 %), Rakine (4 %) Mon (2 %) Chin (2,5 %), Kayah (1,83 %), dan Kachin (1,5 %). Sebagai negara yang memiliki kelompok etnis yang beragam dengan delapan kategori etnis mayoritas, Myanmar tidak luput dengan etnis minoritas salah satunya ialah Rohingya. Rohingya adalah salah satu etnis Indo-Raya yang menganut agama Muslim di Myanmar dan sebagian besar berada di negara bagian Arakan (*Rakhine State*), wilayah Tenggara Myanmar.

Kolonialisasi yang dilakukan oleh Inggris pada tahun 1823 dan okupasi dari Burma menjadikan masyarakat Muslim Rohingya mengalami diskriminasi. Inggris yang saat itu menjajah Myanmar menimbulkan perpecahan saat mengambil alih wilayah Rakhine. Masyarakat mayoritas Buddha pun akhirnya membenci umat Muslim Rohingya dan melabeli mereka sebagai '*Kalas*' atau sebutan bagi orang asing (Tha, 13/09/2007). Pada tahun 1982, pemerintah Burma memberlakukan Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 1982. Dokumen

tersebut mengidentifikasi 135 kelompok etnis, yang menurut pemerintah telah menetap di Burma sebelum tahun 1823, dan tidak memasukkan Rohingya sebagai salah satu dari mereka. Adanya pengesahan undang-undang kewarganegaraan, transisi ke pemerintahan militer, serta transisi ke demokrasi, menjadikan Rohingya secara efektif dan konsisten dikeluarkan dari negara Myanmar.

### Konflik Rohingya Tahun 2017

Pada tanggal 25 Agustus 2017, timbul sebuah konflik antara pemerintah Myanmar dan sebuah kelompok militan bersenjata yang diketahui sebagai ARSA di Rakhine, Myanmar. Zoglul (2017) dalam Bepler (2018) mengatakan bahwa konflik yang menimbulkan penganiayaan, keadaan tanpa kewarganegaraan, dan kemiskinan Rohingya memudahkan kelompok ekstrimis untuk menemukan pengikut dan memicu meningkatnya kelompok pemberontak bersenjata. Menurut BBC News (06/09/2017), ARSA adalah sebuah kelompok militan yang disebut sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintahan Myanmar dalam membela, menyelamatkan, serta melindungi Rohingnya dari penindasan negara "sesuai dengan prinsip pertahanan diri". Penyerangan yang dilakukan oleh ARSA menjadi titik awal konflik di Rakhine terjadi.

Kejadian yang terjadi di Rakhine dinilai oleh UN, komunitas internasional, serta berbagai kelompok hak asasi manusia sebagai kegiatan *ethnic cleansing* atau Genosida. Terdapat sebanyak 6.700 orang dari etnis Rohingya terbunuh akibat konflik yang terjadi, serta adanya campur tangan oleh pasukan Keamanan Myanmar yang ikut melakukan aksi penembakan kepada warga sipil yang berusaha pergi meninggalkan wilayah Rakhine menuju ke Bangladesh dan menempatkan ranjau darat pada wilayah perbatasan yang dilintasi oleh Rohingya (Council on Foreign Relation, 23/01/20).

Akibat dari Genosida yang terjadi di Rakhine, membuat Rohingya yang berada di

daerah tersebut lari meninggalkan Rakhine menuju ke beberapa negara untuk mengungsi. Pada Akhir tahun 2016-2017 Myanmar menjadi

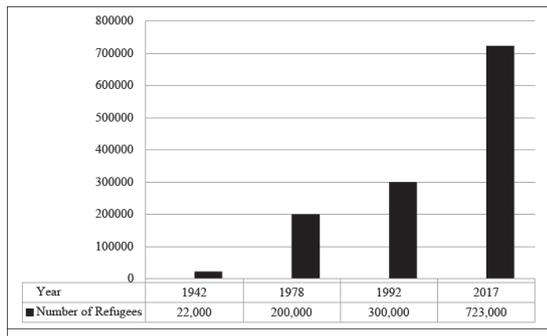


**Gambar 1.1** Peta Wilayah Cox's Bazar dan Negara Bagian Rakhine, Myanmar

Sumber: Aljazeera News, 2017

negara yang memiliki jumlah pengungsi terbanyak ke empat setelah Syria, Afganistan dan Sudan Selatan (UNHCR, 2017). Salah satu negara yang menjadi tujuan terbanyak yang dikunjungi oleh pengungsi Rohingya yakni daerah Cox's Bazar di Chittagong, Bangladesh. Berdasarkan gambar 1.1 Cox's Bazar adalah sebuah distrik di daerah Chitaggong, Bangladesh Tenggara yang berbatasan langsung dengan Rakhine. Dari Rakhine menuju ke Cox's Bazar memiliki jarak tempuh sejauh 278 kilometer. Melihat dari jarak yang paling dekat dengan daerah perbatasan Rakhine serta sejarah Rohingya yang berasal dari Bangladesh menjadikan Cox's Bazar sebagai tujuan utama para pengungsi untuk lari dari konflik yang sedang terjadi di Rakhine.

Tahun 2017 merupakan tahun dengan angka pengungsi terbesar yang masuk ke dalam wilayah Cox's Bazar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yakni tahun 1942 saat Rohingya pertama kali lari dan mengungsi ke wilayah Cox's Bazar, dan pada tahun 1978, serta tahun 1992 (Mallick, 2020: 204).



**Gambar 1.2** Arus masuk pengungsi Rohingya dari Myanmar ke Bangladesh

Sumber: *Deutsche Welle* (2017) dalam Mallick, 2020

Berdasarkan gambar 1.2 terdapat kurang lebih 723.000 pengungsi tercatat yang lari dari Rakhine ke Cox's Bazar, Bangladesh (Carrol, 30/07/2019). Sebanyak 75% pengungsi yang tinggal di wilayah Cox's Bazar tiba pada bulan Agustus hingga September 2017.

### Kebijakan Repatriasi Myanmar

Repatriasi didefinisikan oleh Kirui *et.al* (2020: 122) adalah sebuah aktifitas pemulangan pengungsi ke negara asal. Menurut Torido (2015: 9), kegiatan repatriasi dapat terjadi karena adanya suatu tekanan eksternal dari negara suaka maupun negara asal untuk memulangkan kembali pengungsi ke negara asal. Pada tahun 2017 ditahun yang sama konflik pemusnaan etnis terhadap rohingya terjadi, pemerintah Myanmar dan Bangladesh menandatangani MoU (*Memorandum of Understanding*) terkait krisis pengungsi Rohingya pada 23 November 2017. MoU yang disepakati oleh kedua belah pihak negara berisi kesepakatan repatriasi yang bersifat *Voluntary Repatriation* dengan rencana untuk memulangkan kembali para pengungsi Rohingya yang berada di Kamp Cox's Bazar kembali ke wilayah Rakhine, Myanmar dalam waktu dua tahun (Aljazeera, 20/08/2019). Berdasarkan kesepakatan yang dibuat, disepakati bahwa sebanyak 1.500 Rohingya yang "memenuhi syarat" akan dikembalikan setiap minggu (Taniparti, 12/11/2019). Syarat yang diberlakukan bagi para pengungsi sesuai dengan penetapan yang dibuat oleh pemimpin

negara Myanmar, Aung San Suu Kyi dalam Konferensi Internasional di Yangon, yakni (1) Pengungsi dapat menunjukkan bukti dokumen tempat tinggal jangka panjang di Myanmar seperti pendaftaran sekolah, perawatan medis dan pekerjaan, (2) Pengungsi harus secara sukarela kembali ke Rakhine tanpa adanya paksaan, (3) dapat membuktikan bahwa pengungsi memiliki kerabat di sisi perbatasan Myanmar dan (4) pada anak-anak dibawah umur memberikan bukti bahwa orang tua mereka merupakan penduduk tetap Myanmar (Oh, 2017: 3)

Setelah kesepakatan repatriasi dibuat pada 2017, Bangladesh dan Myanmar melakukan upaya untuk memulangkan pengungsi Rohingya ke Myanmar pada tanggal 15 November 2018 namun upaya tersebut gagal. Pada tahun 2019 kedua pemerintah kembali melaksanakan kegiatan repatriasi terhadap pengungsi Rohingya di Bangladesh namun kegiatan tersebut kembali gagal. Hal ini disebabkan tidak adanya pengungsi yang bersedia direpatriasi ke Myanmar karena belum terjaminnya keamanan dan status kewarganegaraan yang penuh (Banka, 2019 dalam Faruque, 2022: 29), serta kegiatan repatriasi juga dinilai oleh kelompok pengungsi Rohingya di Cox's Bazar hanya sebatas persetujuan satu pihak tanpa mengikutsertakan Rohingya dalam dialog repatriasi bersama pemerintah Myanmar (Petersen & Rahman, 2019). Selain itu karena repatriasi yang dilakukan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun atau bersifat sukarela menjadikan upaya repatriasi tersebut tidak berhasil.

Menurut Bradley (2013: 9), pengungsi pada dasarnya tidak memiliki *power* untuk menghentikan negara asal dalam merampas hak-hak mereka sebagai warga negara. Pengungsi yang tidak diberi pengakuan dari negara menyulitkan mereka dalam menemukan komunitas atau negara yang dapat menjamin hak serta perlindungan bagi mereka. Rohingya sebagai pengungsi yang tidak diakui kewarganegaraannya oleh negara asal maupun negara suaka menjadikan kelompok etnis tersebut terjebak pada dilema yang tidak

memiliki akhir. Di satu sisi, Myanmar sebagai negara asal menerapkan kegiatan repatriasi terhadap Rohingya namun kegiatan tersebut tidak dijalankan secara maksimal melihat dari kondisi wilayah serta persyaratan yang harus dipenuhi oleh pengungsi yang ingin kembali ke wilayah asal mereka. Repatriasi yang seharusnya diikuti oleh pemulihan nyatanya tidak dijalankan oleh pemerintah Myanmar. Tidak adanya jaminan perlindungan oleh negara apabila pengungsi kembali ke wilayah asal serta pemulihan pemukiman yang belum direalisasikan oleh pemerintah menjadikan kegiatan repatriasi yang diusung oleh Myanmar tidak maksimal dan hanya sebatas sebuah kebijakan pemulangan kembali pengungsi tanpa memikirkan langkah pasca repatriasi dalam menghalau kembali terjadinya kekerasan terhadap Rohingya di Myanmar.

### **Determinan Kebijakan Repatriasi Myanmar terhadap Rohingya**

Perubahan sikap pemerintah Myanmar terhadap Rohingya yang pada awal tidak mengakui etnis tersebut sebagai bagian dari mereka, namun saat setelah terjadinya konflik yang memakan korban jiwa hingga disebut sebagai “pemusnahan etnis” oleh UN, pemerintah Myanmar mengeluarkan kebijakan repatriasi terhadap etnis Rohingya yang menetap di daerah kamp Cox’s Bazar, Bangladesh. Kebijakan repatriasi yang telah disepakati oleh Myanmar dan Bangladesh dinilai sangat mengundang pertanyaan bagi seluruh dunia. Faktor-faktor yang dapat memengaruhi sebuah pembuatan kebijakan sering disebut sebagai determinan kebijakan luar negeri yang terdiri dari dua determinan, yakni eksternal dan internal (Jain, (2018: 165). Pada penelitian ini penulis fokuskan pada determinan eksternal yang terdiri dari opini publik dunia internasional, organisasi internasional, reaksi negara lain, aliansi, dan struktur kekuatan.

Pada faktor opini publik dunia internasional, menjelaskan bahwa setiap negara dalam merumuskan kebijakan luar negeri perlu memperhatikan opini publik dunia internasional karena dinilai dapat

memengaruhi pemimpin negara dalam mengambil sebuah keputusan. Pada kasus diskriminasi terhadap Rohingya, banyak ditemukan beberapa opini publik dunia internasional. Opini-opini tersebut meliputi respon dari beberapa negara seperti Australia melalui Menteri Luar Negeri yang mengeluarkan pernyataan terhadap pemerintah Myanmar agar dapat secepatnya menghentikan diskriminasi terhadap etnis Rohingya (Payne, 9/9/2017), Kanada yang menyalahkan pemerintahan Aung San Suu Kyi beserta militer Myanmar yang tidak dapat menghentikan tindak kekerasan terhadap Rohingya (Carbert, 6/9/2017), hingga negara Prancis yang memilih untuk menanggukkan kerjasama pertahanan yang sementara terjalin dengan pemerintah Myanmar (Hussein, 2017 dalam Amin Nino *et.al* (2020: 8). Respon berupa kritik juga muncul melalui presiden Macron yang menyatakan bahwa ‘pemurnian etnis’ yang dilakukan oleh Myanmar merupakan hal yang keji dan tentunya dunia harus bertindak terhadap perilaku pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar terhadap Rohingya (SBSNews, 21/9/2017).

Selanjutnya pada faktor organisasi internasional yang dinilai memiliki dampak yang signifikan terhadap penentu kebijakan luar negeri suatu negara, pada konflik Rohingya organisasi internasional mengeluarkan sebuah respon terhadap Myanmar. Respon tersebut berasal dari salah satu organisasi internasional ASEAN dan Myanmar merupakan salah satu negara anggota dan tergabung dalam satu kawasan Asia Tenggara. ASEAN selaku organisasi internasional yang menaungi negara-negara di Asia Tenggara sangat menentang pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar terhadap Rohingya. Akan tetapi, melihat dari struktur organisasi yang bersifat non-intervensi dan menghormati prinsip-prinsip utama konsensus serta pada deklarasi ASEAN tahun 2007 mengenai perlindungan serta pemajuan hak-hak pekerja migran yang hanya difokuskan pada konteks pekerja migran dengan tidak menyebutkan mengenai pencari

suaka atau pengungsi (Shivakoti, 8/11/2017), membuat ASEAN tidak dapat membantu dalam penyelesaian konflik terhadap Rohingya di Myanmar (Aljazeera, 20/10/2020).

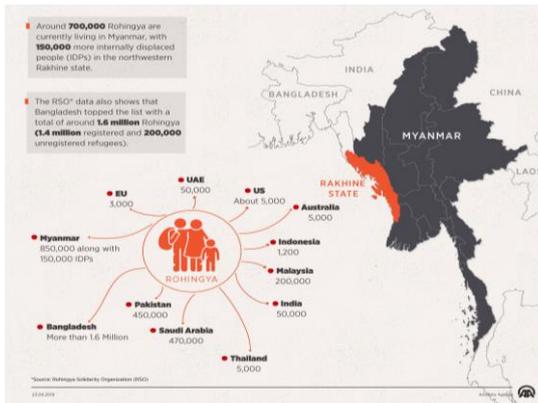
Pada faktor struktur kekuatan, pembentukan suatu kebijakan luar negeri didefinisikan dengan adanya sebuah kekuatan relatif dari suatu negara dalam sistem internasional (Bojang, 2018: 3). Amerika Serikat (AS) sebagai salah satu negara yang memiliki struktur kekuatan pada sistem internasional dinilai dapat mempengaruhi sebuah negara dalam pembuatan kebijakan luar negeri. AS mengancam tindakan eksodus yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya. Wakil Presiden AS, Mike Pence mengeluarkan pernyataan bahwa tindakan yang diperbuat oleh pemerintah Myanmar dapat mengancam perdamaian dunia. Pada tahun 2018, pemerintah AS menjatuhkan sanksi kepada Militer Myanmar atas penindasan terhadap Rohingya dengan sanksi yang ditujukan sebagai pembersihan etnis terhadap suatu etnis dan menjadi salah satu pelanggaran HAM terbesar yang dilakukan oleh Myanmar (Loonena, 14/5/2021). Melihat dari ketiga faktor tersebut belum sepenuhnya menjadi alasan pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan repatriasi terhadap etnis Rohingya di Bangladesh, sehingga pada penelitian ini penulis fokuskan pada dua faktor yang memengaruhi pembuatan kebijakan repatriasi Myanmar terhadap Rohingya, yaitu faktor dari reaksi negara lain dan aliansi.

#### • Reaksi Negara Lain

Aksi diskriminasi oleh pemerintah Myanmar terhadap Rohingya menjadi perhatian seluruh dunia internasional. Mulai dari pelanggaran HAM yang disebut oleh UN sebagai suatu pelanggaran terberat sepanjang sejarah, hingga kerugian yang dihasilkan oleh konflik Rohingya terhadap dunia politik internasional. Hal ini menjadi sebuah tragedi yang mencuri perhatian banyak negara di dunia, termasuk negara kawasan seperti Indonesia dan Malaysia hingga negara yang berbatasan langsung dengan Myanmar yaitu Bangladesh.

Indonesia dan Malaysia sebagai negara anggota ASEAN terdampak langsung oleh gelombang pengungsi Rohingya yang terpaksa lari dari Rakhine untuk menghindari dari konflik. reaksi Indonesia dan Malaysia terhadap konflik Rohingya sangat Nampak terlihat. Hal ini dikarenakan eksodus yang terjadi pada pengungsi Rohingya bukan lagi tentang krisis kemanusiaan, melainkan telah meningkat menjadi ancaman keamanan dan beban ekonomi bagi negara penerima pengungsi (Shukri, 2021: 241). Dikarenakan adanya faktor kedekatan relatif dengan keyakinan agama yang sama serta sebagai negara tujuan Rohingya dalam mencari suaka, Indonesia dan Malaysia menjadi yang paling terdengar dalam memperlakukan kekejaman Myanmar terhadap minoritas Rohingya (Shukri, 2021: 241).

Sebagai negara yang memiliki dampak yang besar terhadap politik dan ekonomi di Asia Tenggara, peran Indonesia sangat penting dalam menekan pemerintah Myanmar untuk menghentikan konflik Rohingya. Pada konflik etnis yang terjadi pada Rohingya, Presiden Indonesia Ir. Joko Widodo mengirim Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi ke Myanmar untuk mendesak pemerintah Myanmar. Pesan yang disampaikan oleh Retno Marsudi selaku Menteri Luar Negeri Indonesia agar pemerintah Myanmar dapat memberhentikan diskriminasi terhadap etnis Rohingya serta menjamin adanya perlindungan kepada seluruh warga negara, termasuk warga Muslim Myanmar, sekaligus memberikan akses penuh terhadap bantuan kemanusiaan (Reuters, 03/09/2017). Pada pertemuan yang dilangsungkan di Myanmar, Indonesia mengajukan sebuah kebijakan berupa usulan formula 4+1, antara lain; pengembalian terhadap status stabilitas dan keamanan internal kawasan; perlindungan kepada seluruh masyarakat terutama di wilayah Rakhine tanpa adanya keberpihakan dan memandang ras; menahan diri, membuka akses kemanusiaan; serta menyepakati bahwa Indonesia dan ASEAN ikut terlibat dalam kegiatan penyaluran bantuan kemanusiaan



**Gambar 1.3** Data negara Suaka Pengungsi Rohingya  
Sumber: *Rohingya Solidarity Organization*

(Setiawan & Hamka, 2020 dalam Sundari *et al*, 2021: 184).

Malaysia sebagai negara mayoritas muslim dan menjadi bagian dari Asia Tenggara ikut serta dalam mendesak pemberhentian diskriminasi oleh pemerintah Myanmar terhadap Rohingya. Malaysia menjadi negara yang menampung jumlah pengungsi Rohingya terbanyak di Asia Tenggara.

Menurut survey RSO pada Gambar 1.3 terdapat sebanyak 200.000 pengungsi Rohingya yang menetap sementara mencari suaka di negara tersebut sejak terjadinya eksodus di wilayah Rakhine pada tahun 2017 (Fong, 19/02/2023). Dengan jumlah pengungsi yang tergolong banyak, pengungsi Rohingya dinilai mulai meresahkan masyarakat lokal. Hal tersebut diakibatkan oleh tidak patuhnya pengungsi Rohingya terhadap hukum negara serta munculnya koloni Rohingya atau kelompok – kelompok pengungsi yang mulai tersebar di wilayah Kuala Lumpur. Akibat dari dampak negatif yang disebabkan oleh pengungsi Rohingya di Malaysia, memunculkan demonstrasi dengan melibatkan Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak pada September 2017 menegaskan bahwa konflik Rohingya sebagai konflik antaragama yang dapat mengganggu hubungan antar umat Muslim dan umat Buddhis di dunia (Bunyairi & Siem, 2021: 120). Perdana Menteri Malaysia mengeluarkan pernyataan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Myanmar terhadap Rohingya merupakan suatu penghinaan terhadap Islam (Strangio, 2020).

Tidak hanya pada negara kawasan Asia Tenggara saja, Bangladesh sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Myanmar serta menjadi negara yang terkena dampak terhadap konflik etnis yang terjadi. Bangladesh yang merupakan negara tujuan utama pengungsi Rohingya untuk lari dari konflik menuntut Myanmar dalam menyelesaikan permasalahan internal negara tersebut. Penduduk setempat di Cox's Bazar mulai menyalahkan Rohingya atas berbagai masalah yang disebabkan oleh pengungsi. Tingginya populasi pengungsi menimbulkan kriminalitas yang tinggi dan sangat merugikan wisatawan serta warga lokal setempat. Akibat dari dampak yang merugikan, Bangladesh sangat mendukung kegiatan repatriasi secepatnya dengan mendesak untuk mengembalikan pengungsi Rohingya kembali ke Rakhine, Myanmar. Pemerintah Bangladesh juga menuntut pemerintah Myanmar agar dapat berperan lebih baik dalam meyakinkan pengungsi untuk direpatriasi ke daerah Wilayah Rakhine, serta menyediakan tempat tinggal yang aman bagi Rohingya di wilayah tersebut (Shukri, 2021: 253).

Pemerintah Myanmar pada awalnya sangat menentang upaya penyelesaian konflik Rohingya dan bersikeras untuk mengeluarkan upaya tersebut dari agenda dalam pertemuan antar negara-negara ASEAN. Akan tetapi, perubahan sikap Myanmar dinilai berubah dan menjadi lebih kooperatif dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi terhadap Rohingya dikarenakan oleh adanya kritik serta pengawasan dari negara-negara yang semakin intensif terhadap respon Myanmar dalam menangani konflik tersebut (Shukri, 2021: 246).

#### • Aliansi

Faktor yang kedua adalah pengaruh negara aliansi terhadap Myanmar. Tiongkok merupakan salah satu negara aliansi, serta berbatasan langsung dengan Myanmar. Tiongkok dinilai sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi, politik serta Militer dari Myanmar (Ruponty & Shuvo, 2021: 115). Menurut Julianisa *et.al* (2023: 11), kekuatan ekonomi suatu negara sangat memungkinkan

menjadi pengaruh terhadap keputusan suatu negara. Pada bidang ekonomi, Tiongkok memiliki pengaruh yang cukup besar di Myanmar dalam beberapa bidang, termasuk pasokan listrik dan perdagangan. Tiongkok telah menjadi investor terbesar di Myanmar. Sebanyak 297 perusahaan Tiongkok menginvestasi senilai 20.353.528 juta USD, yang merupakan 25,92 % dari total FDI Myanmar (Frankel, 2010 dalam Ruponty dan Shuvo, 2021: 116). Investasi yang dilakukan Tiongkok pada Myanmar yaitu proyek *Belt and Road Initiative* (BRI) yang memiliki tujuan untuk meningkatkan dan mempromosikan hubungan kerja sama regional, pertukaran perdagangan dan budaya, serta kemakmuran dan harmoni social antar negara. Selain BRI, Tiongkok juga aktif dalam proyek infrastruktur lainnya seperti pelabuhan, pembangunan pipa dan gas, kereta api, kawasan industri, hingga proyek pembangkit listrik (Lwin, 2019; Joy, 2018 dalam Yuan & Lee, 2023: 6) Bagi Myanmar, bantuan ekonomi dan investasi dari Tiongkok sangat penting dalam pembangunan serta mempertahankan perekonomian Myanmar dalam pasar global.

Pada kasus Rohingya, Tiongkok telah mendesak Myanmar baik secara bilateral maupun multilateral untuk memulai repatriasi Rohingya sesegera mungkin dengan mengatakan bahwa krisis Rohingya merupakan krisis yang penting dan harus segera diselesaikan. Sebagai negara aliansi yang kuat terhadap Myanmar, Tiongkok berperan sebagai mediator antara Bangladesh dan Myanmar dalam pelaksanaan repatriasi pengungsi Rohingya di Myanmar. Partai Komunis China (CPC) menandatangani sebuah MoU dengan pemerintah Bangladesh untuk bermediasi dengan Myanmar terkait pemulangan orang-orang Rohingya kembali ke Rakhine. Melalui mediasinya terhadap kegiatan repatriasi, Tiongkok menunjukkan dukungannya terhadap pengungsi Rohingya di Bangladesh dengan mengirimkan bantuan berupa 150 Ton bahan pangan ke wilayah pengungsian di Cox's Bazar (Yuan & Lee, 2023: 9).

Tiongkok juga menyerukan gencatan senjata di Negara Bagian Rakhine, Myanmar agar pengungsi Rohingya dapat kembali dari Bangladesh ke daerah asal mereka. Pada bulan November 2017, Tiongkok mengusulkan solusi tiga langkah terhadap Myanmar dalam mengatasi permasalahan Rohingya (Ruponty & Shuvo, 2021: 117). Tiga solusi tersebut antara lain, gencatan senjata, dialog bilateral antara Bangladesh dan Myanmar dalam mencapai solusi yang dapat diterapkan, dan penuntasan kemiskinan dalam mengatasi akar penyebab dari terjadinya krisis Rohingya (Hossain & Aktar, 2019: 266).

## PENUTUP

kebijakan repatriasi yang dilakukan oleh Myanmar merupakan sebuah kebijakan baru dan merupakan sebuah bentuk perubahan sikap Myanmar terhadap etnis Rohingya pasca terjadinya konflik etnis pada tahun 2017. Kebijakan Repatriasi yang dibuat bukan karena pemerintah Myanmar ingin mengakui Etnis Rohingya sebagai bagian dari Myanmar melainkan karena adanya determinan eksternal yang memengaruhi pemerintah dalam pembuatan kebijakan tersebut. Determinan eksternal yang memengaruhi pembuatan kebijakan pemerintah Myanmar adalah faktor reaksi dari negara lain dan aliansi. Desakan dari negara kawasan yang berpengaruh, seperti Indonesia dan Malaysia, serta negara yang berbatasan langsung dengan Myanmar, seperti Bangladesh yang terdampak oleh konflik etnis Rohingya menjadi salah satu alasan kebijakan repatriasi dibuat.

Pengaruh dari negara aliansi terhadap perumusan kebijakan suatu negara pun sangat dapat terjadi karena adanya ketergantungan terhadap kondisi suatu negara kepada negara aliansi. Tiongkok sebagai negara aliansi Myanmar yang selalu mendukung kepentingan negara Myanmar baik dalam bidang ekonomi maupun politik menjadi faktor yang sangat berpengaruh dalam pembuatan kebijakan repatriasi Rohingya. Lebih lanjut, terkait penerapan repatriasi terhadap etnis Rohingya

di wilayah Cox's Bazar di Bangladesh tidak sepenuhnya sesuai dengan tujuan serta makna asli dari repatriasi tersebut. Kegiatan repatriasi yang diusung oleh Myanmar bersifat *Voluntary*, yakni pengungsi pulang secara sukarela tanpa adanya paksaan, serta harus adanya pemulihan ikatan antarpengungsi yang kembali dengan warga negara. Pemerintah Myanmar terkesan hanya sebatas menjalankan repatriasi tanpa memikirkan langkah selanjutnya pengungsi setelah direpatriasi ke wilayah asal mereka yang menjadi wilayah konflik. Tidak adanya perlindungan hukum oleh pemerintah Myanmar serta kondisi wilayah Rakhine yang masih belum aman dari konflik memperlihatkan bahwa kebijakan repatriasi dibuat hanya sebagai alat untuk menghindari tekanan internasional akibat adanya pelanggaran HAM terhadap Rohingya yang diperbuat oleh Myanmar

## Daftar Pustaka

### Buku

Bojang, AS. 2018. *The Study of Foreign Policy in International Relations*. Journal of Political Sciences & Public Affairs. Student, Ege University, Izmir, Turkey.

Martono, N. 2015. *Metode Penelitian Sosial : Konsep-konsep kunci*, Divisi Buku Perguruan Tinggi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Prasetyo, Bambang dan Jannah, Lina Miftahul. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Bradley, Megan. 2013. *Refugee Repatriation: Justice, Responsibility and Redress*. Cambridge University Press, New York.

### Jurnal atau Karya Ilmiah

Amin Nino, P., Dharmiasih, D., & Kawitri Resen, P. 2020. *Diplomasi Pertahanan Dan Militer Pemerintah Australia dengan Pemerintah Myanmar di tengah Terjadinya Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Etnis Rohingya tahun 2018*. DIKSHI (DISKUSI ILMIAH KOMUNITAS HUBUNGAN INTERNASIONAL), 1(12). Tersedia di: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/article/view/62777> Akses: 25 Agustus 2023.

Bepler, Stefan. 2018. *The Rohingya conflict: Genesis, current situation and geopolitical aspects*, Lichtbrücke e.V. / Bridge of Light, Leppestr. 48,

51766 Engelskirchen, Germany. Tersedia di : [https://www.researchgate.net/figure/Map-of-Rakhine-state-in-Myanmar-the-refugees-camps-are-in-Coxs-Bazar-Bangladesh\\_fig1\\_338548226](https://www.researchgate.net/figure/Map-of-Rakhine-state-in-Myanmar-the-refugees-camps-are-in-Coxs-Bazar-Bangladesh_fig1_338548226) diakses pada 22 Januari 2023

BOY, Charel Pasifichus; FASISAKA, Idin; KAWITRI RESEN, Putu Titah. *Analisis Faktor Penentu Kebijakan Luar Negeri Rusia dalam Konflik Nagorno-Karabakh tahun 2012 – 2016*. DIKSHI (DISKUSI ILMIAH KOMUNITAS HUBUNGAN INTERNASIONAL), [S.l.], v. 1, n. 1, apr. 2019. ISSN 2828-1853. Tersedia di: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/article/view/48134> Akses: 25 Agustus 2023.

Busyairi, Muhammad. Siem, Bui Thi Kim. 2021. *Rohingya, A Struggle For Recognition As "Indigenous"*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2021, Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian Politeknik Imigrasi.

Crisp, Jeff. Katy, Long. 2016. *"Safe and Voluntary Refugee Repatriation: From Principle to Practice"*. *Journal on Migration and Human Security*, Volume 4 Number 3 (2016): 141-145

Dar, Arshid Iqbal. Haq, Irfan Ul. Khan, Tanveer Ahmad. *"Alliances in International Politics: A Comparative Study of Kenneth Waltz's and Stephen Walt's Theories of Alliances"*, Kaav International Journal of Arts, Humanitirs and Social Sciences, Vol. 4.

Faruque, e-Taufiq. 2020. *"Bangladesh's Policy on Rohingya Refugees: Securitization or What?"* NUST Journal of International Peace & Stability 2020, Vol. III (2) Hal. 28-47.

Gimba, Zainab. Ibrahim, Sheriff Ghali. 2017. *"A Review of External Factors That Determine Foreign Policy Formulation"*, Indo-Iranian Journal of Scientific Research (IIJSR), Vol. 2.

Hossain, Mobarak. Aktar, Md Nadim. 2019. *Bangladesh-China Contemporary Relations: Rohingya Refugee Crisis and its Impact*, Jagannath University Journal of Arts, Vol. 9, No. 2, Tersedia di: [https://jnu.ac.bd/journal/assets/pdf/9\\_2\\_379.pdf](https://jnu.ac.bd/journal/assets/pdf/9_2_379.pdf) Diakses pada 20 Mei 2023

Jain, Reetesh. 2018. *Significance and determinants of foreign policy*. Vol.3, Issue 1, January 2018. Page No. 164-166. International Journal of Advanced Research and Development.

- Julianisa, K., Priadarsini, N., & Sushanti, S. (2022). *Faktor-Faktor Pendorong Indonesia Menyetujui Perjanjian Ekonomi dengan Australia Dalam Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA)*. DIKSHI (DISKUSI ILMIAH KOMUNITAS HUBUNGAN INTERNASIONAL), 3(1), 1-13. Tersedia di: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/article/view/88820> Akses: 25 Agustus 2023.
- Kirui, Peter K. Wanyonyi, Hellen S. Kutto, Naomi. 2020. "Somali Refugee Solutions in Kenya: challenges of Repatriation and Prospects of Local Integration", *Advances in Social Science Research Journal*, Vol.7, No.3.
- Mallick, Abdullah Hossain, 2022. *Rohingya Refugee Repatriation from Bangladesh: A Far Cry From Reality*. *Journal of Asian Security and International Affairs*. 7(2) 202–226, 2020
- Ruponty. M Mehzabin & Shuvo, Rahim. 2017. *China and India's Comparative Response to the 2017 Rohingya Crisis in Bangladesh*. Vo. 1, Issues 2, Tersedia di: <https://ojs.literacyinstitute.org/index.php/ijias/article/view/216> Diakses pada 1 Agustus 2020
- Shang, Po. 2021. *Myanmar's Foreign Policy: Shifting Legitimacy, Shifting Strategic Culture*, Vol.4, International University of Japan, Minamiuonuma, Nigata, Jepang.
- Shukri, S. 2021. *The Rohingya refugee crisis in Southeast Asia: ASEAN's role and way forward*. *Journal of International Studies*, 17, 239-263. Tersedia di: <https://doi.org/10.32890/jis2021.17.10> Diakses pada 20 Mei 2023
- Stanley, Lauren. 2015. *Repatriation as Controversial Concept: The Case of Somali Refugees in Kenya*. School of International Development and Global Studies University of Ottawa Tersedia di: [https://ruor.uottawa.ca/bitstream/10393/32750/1/Stanley\\_Lauren\\_2015\\_researchpaper.pdf](https://ruor.uottawa.ca/bitstream/10393/32750/1/Stanley_Lauren_2015_researchpaper.pdf) Diakses pada 2 Mei 2022
- Torido, Aryan. 2015. *Proses Repatriasi Pengungsi Internasional Global ke Negara Asal di Asia dan Afrika*. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol. 39, No.1, 91-107
- Walter, T. Aaron. 2015. *Foreign Policy: Public Opinion and Political Legacy*. *Slovak Journal of Political Sciences*, Volume 15, 2015, No. 3 Tersedia di: [https://www.researchgate.net/publication/307702946\\_Foreign\\_Policy\\_Public\\_Opinion\\_and\\_Political\\_Legacy](https://www.researchgate.net/publication/307702946_Foreign_Policy_Public_Opinion_and_Political_Legacy) Diakses pada 18 November 2022
- Yuan, Changrui. Lee Brice, Tseen Fu. 2023. *Exploring China's Response to The Rohingya Crisis: A Liberal Perspective*. *Journal of Terrorism Studies*: Vol. 5: No.1, Article 1, Tersedia di: <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1080&context=jts> Diakses pada 30 Juni 2023
- Media Daring**
- Albert, Eleanor & Maizland, Lindsay. (23 Januari 2020, par 6). *The Rohingya Crisis*. *Council of Foreign Relations*. (Daring) Tersedia di: <https://www.cfr.org/backgrounder/rohingya-crisis> diakses pada tanggal 12 November 2022.
- Aljazeera (Daring). 2019. *'Myanmar officials hold Repatriation talks with Rohingya Leaders'*, Tersedia di: <https://www.aljazeera.com/news/2019/07/myanmar-officials-hold-repatriation-talks-rohingya-leaders-190727122259329.html> Diakses pada tanggal 10 Agustus 2020.
- BBC News, (Daring). *'Myanmar: Who are the Arakan Rohingya Salvation Army?'*, Tersedia di: <https://www.bbc.com/news/world-asia-41160679> diakses pada 10 Agustus 2020
- Burma Centrum Nederland Transnational Institute, (Daring). 2014. *Ethnicity without Meaning, Data without Context, The 2014 Census, Identity and Citizenship in Burma/Myanmar'*, Tersedia di: [https://www.tni.org/files/download/bpb\\_13.pdf](https://www.tni.org/files/download/bpb_13.pdf), diakses pada 7 Agustus 2020
- Carbert, Michelle. 2017. *Canada Faults Myanmar Government for Failing to End Violence Against Rohingya Muslims*. *The Globe and Mail News*. Tersedia di: <https://www.theglobeandmail.com/news/politics/canada-faults-myanmar-government-for-failing-to-end-violence-against-rohingya-muslims/article36193618/> Diakses pada 29 Juli 2023
- Carroll, Joshua. 2019. *Rohingya suspicious as Myanmar Touts repatriation plan*. *Al-Jazeera News*, Tersedia di: <https://www.aljazeera.com/news/2019/7/30/rohingya-suspicious-as-myanmar-touts->

- repatriation-plan Diakses pada: 19 Desember 2022
- Chivaka, Reason. 2018. *Secondary Data Analysis as one of the most effective Qualitative Technique*, melalui URL: Diakses pada: 14 September 2022
- Embassy of The Republic of Myanmar in Brazil, *General Information of Myanmar*, (Daring) melalui URL: [https://myanmarbsb.org/\\_site/general-information/](https://myanmarbsb.org/_site/general-information/) [Akses: 12 September 2022]
- Fong, Fernando. 2023. *Rohingya Refugees Face Envy and Fear in Malaysia*. The Rakyat Post (Daring), Tersedia di: <https://www.therakyatpost.com/news/malaysia/2023/02/19/rohingya-refugees-face-envy-and-fear-in-malaysia/#:~:text=As%20of%20end%20Janua,ry%202023,Myanmar%2C%20comprising%20some%20106%2C500%20Rohingyas> diakses pada 1 Juni 2023
- Human Rights Watch (Daring). (n.d). *'Discrimination In Arakan'* Tersedia di: <https://www.hrw.org/reports/2000/burma/burm005-02.htm>, Diakses pada 10 Februari 2021
- Loonena, Leshan. 2021. (Daring). *US Response to The Rohingya Crisis*, Tersedia di: <https://ace-usa.org/blog/research/research-foreignpolicy/u-s-response-to-the-rohingya-crisis/> Diakses pada 3 Agustus 2023
- M.A Tahir Ba Tha. 2007. *'A Short History of Rohingya and Kamans of Burma'*, Kaladan News, Tersedia di: [http://www.burmalibrary.org/docs21/Ba\\_Tha-Kaladan-News&Network-Myanmar-2007-09-13-A\\_Short\\_History\\_of\\_Rohingya\\_and\\_Kamans\\_of\\_Burma-en.pdf](http://www.burmalibrary.org/docs21/Ba_Tha-Kaladan-News&Network-Myanmar-2007-09-13-A_Short_History_of_Rohingya_and_Kamans_of_Burma-en.pdf), Diakses pada tanggal 7 Agustus 2022
- M. Majid. (Daring). 2017. *'The Rohingya Crisis: History and Politics'*, Institute of Strategic Studies Tersedia di: [http://issi.org.pk/wp-content/uploads/2017/10/IB\\_Majid\\_dated\\_02-10-2017.pdf](http://issi.org.pk/wp-content/uploads/2017/10/IB_Majid_dated_02-10-2017.pdf), Diakses pada 9 Februari 2021
- Oh, Su Ann. 2017. *The Rohingya in Bangladesh: Another Round in the Cycle of Exodus and Repatriation?*. ISEAS, Yusof Ishak Institute, Singapore, Tersedia di: [https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/ISEAS\\_Perspective\\_2017\\_90.pdf](https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/ISEAS_Perspective_2017_90.pdf) Diakses pada: 12 Mei 2023
- Payne, Sasha. 2017. *Rohingya in Australia hold protest to call for action over Myanmar Violence*. SBS News. Tersedia di: <https://www.sbs.com.au/news/article/rohingya-in-australia-hold-protest-to-call-for-action-over-myanmar-violence/o86yqskxr> Diakses pada 29 Juli 2023
- Petersen, Hannah E. dan Rahman Shaikh A. 2019. *Rohingya Refugee Refuse to Return to Myanmar Without Rights Guarantee*. The Guardian, Tersedia di: <https://www.theguardian.com/world/2019/aug/21/not-without-our-rights-rohingya-refugees-refuse-to-return-to-myanmar> Diakses pada 21 Januari 2023
- SBS News. 2017. *French President labels attacks on Rohingya Minority as 'Genocide'*. Tersedia di: <https://www.sbs.com.au/news/article/french-president-labels-attacks-on-rohingya-minority-as-genocide/d0r9ulliv> Diakses pada 29 Juli 2023
- Shivakoti, Richa. 2017. *ASEAN's Role in Rohingya Refugee Crisis*. Lee Kwan Yew School of Public Policy. Tersedia di: <https://lkyspp.nus.edu.sg/gia/article/asean-s-role-in-the-rohingya-refugee-crisis> Diakses pada 31 Juli 2023
- Taniparti, Nikita. 2019. *The Ruse of Repatriation: Why the Current Efforts to Repatriate the Rohingya back to Myanmar Will Fail*, Tersedia di: <https://ksr.hkspublications.org/2019/11/12/the-ruse-of-repatriation-why-the-current-efforts-to-repatriate-the-rohingya-back-to-myanmar-will-fail/> Diakses pada 12 Januari 2023
- UNHCR. 2021. *Refugee Camp Explained*. Tersedia di: <https://www.unrefugees.org/news/refugee-camps-explained/> Diakses: 29 April 2023